

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Z. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Arief, B, N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Diantha, I. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2016.
- Farid, A. *Hukum Pidana I (Bersumber dari Hukum Pidana Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hamzah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lamintang, P. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marzuki, P, M. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2024.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi dan Arief, B, N. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Poernomo, B. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Laporan Tahunan PPATK*. Jakarta: PPATK, 2024.

- Raden Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2025.
- Sinurat, A. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2023.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sovia, S, N. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, IAIN Kediri, 2022.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Jurnal

- Aditama, I. “Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Jalan Menuju Keadilan Yang Humanis,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), (Mei 2026): 2666-2647, DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5662>
- Afriansyah, R, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian”, *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), (Juni 2025): 337-348, <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1717>.
- Al Falah, T, “Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), (Januari 2025):151-160, DOI: <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i1.457>.
- Apriani, T, "Implementasi Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim", *Ganec Swara*, 19(3), (September 2025): 1174-1181, DOI: <https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara>
- Ardiansyah, M, R, “Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru”, *Journal Evidence of Law*, 1(2), (Desember 2025): 1641-1653, DOI: <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Azis, M, A, “Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia”, *INNOVATIVE*

- Journal Of Social Science Research* 5(4), (Desember 2025): 3912-3928, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675>.
- Bego, K, “Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), (Desember 2025): 7482-7490, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>.
- Candra, I, “Teori Kontemporer dalam Tujuan Pemidanaan pada Hukum Pidana Modern”, *Judge : Jurnal Hukum*, 6(10), (Juli, 2026): 1944-1955, DOI: doi.org/10.54209/judge.v07i10.2348
- Dedy, S, “Analisis Yuridis Sanksi Pidana Denda Dan Kerja Sosial Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ringan Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Baru”, *Judge : Jurnal Hukum*, 7(2), (Agustus, 2026): 284-293, doi.org/10.54209/judge.v7i01.2671
- Erdianti dan Novita, R, “Challenging Custodial Dominance: Community Service as a Transformative Penal Model in National Criminal Law Modernization”, *Justitia Jurnal Hukum*, 10(1), (Maret, 2026): 128-147, DOI: [10.36501/justitia.v1i2](https://doi.org/10.36501/justitia.v1i2).
- Fadhilah, N, “Praktik Judi Online sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), (Maret 2026): 9747-9754, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7424>.
- Failin, A, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *JCH Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), (September 28, 2017): 14, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Fajarwati, R, A, “Transformasi Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Implikasi Terhadap Kebijakan Penal di Indonesia”, *JIHHP*, 6(3), (April 7, 2026): 2293-2307, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>.
- Farkhan., Rizkianto, K., "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs)",

- Pancasila Law Journal, 3(2), (Desember 2025): 1-9, DOI: <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.118>
- Ghiffary, Ilhan, M and Astuti, et al, “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Kuhp Nasional Sebagai Upaya Mengatasi *Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Sebuah Studi Komparatif) 043 PDN 2025”, *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2025.
- Hardini, F, “Kriminalisasi Judi Online terhadap Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana”, *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), (Agustus 2025): 87-95, <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1002>.
- Hartono, N, R “Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Pemasyarakatan GEVANGENEN*, 1(1), (Februari, 2026): 41-70, DOI: 10.36501/justitia.v1i2
- Hasanah, U, “Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital”, *Jurnal Riset Agama*, 2(3), (Desember 2022): 949-963, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19910>.
- Hidayati, L, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Magelang”, *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(3), (September 2025): 17-23, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.941>.
- Hisbah, H, “Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), (Oktober 11, 2021): 927-937, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1674>.
- Husain, W, R, “Hukum pidana judi online perspektif Indonesia dan perkembangan aspek legalitas”, *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(6), (Desember 2024): 1297-1304, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2049>.
- Indriani, M, dan Hidayatullah, “Arah Kebijakan Pemidanaan Berbasis Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Judge : Jurnal Hukum*. 6(6), (Januari 2026): 2025-2032, doi.org/10.54209/judge.v6i06.2078.

- Juliani, R, K, “Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda”, *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(2), (Juli 2024): 113-122, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3221>.
- Khaoeirun, N, “Efektivitas Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Ancaman di Bawah 5 Tahun Menurut KUHP Nasional.” *Journal of Innovaty & Creativity*, 6(1), (April, 2026): 21507-21513, DOI: <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9775>.
- Kurnia, S, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), (Desember 2025): 904-914, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17975314>.
- Masrita, W, "Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Berkaitan Dengan Pasal 169 KUHP (Studi Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi)", *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 8(1), (Juni 2024): 66-79, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i2>.
- Mawardi, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), (Desember 2020): 308-388, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.53>
- Ningsih, P, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), (November 2025): 7373-7391, DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375>.
- Pratama, M, "Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak", *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), (Maret 2026): 5017-5025, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4843>

- Rafsanjani, J, “Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), (Juni 2023): 219-230, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230>.
- Syahyudin, I, “Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat”, *(Konstitusi) Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), (September 2025): 78-98, DOI: <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1153>.
- Tandesa, M, E, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), (Juni 2024): 363-375, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.242>.
- Toyi, A, R, “Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), (Desember 2025): 1-20, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2503>.
- Triatmojo, A, N, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), (Maret 2026): 2837-2848, DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4805>
- Ulul, A, “Kesiapan Lembaga Pelaksana dan Bentuk Implementasi Pidana Kerja Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *IJCLC*, 6(2), (Juli, 2025): 58-69, DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25968>
- Wibawa, V, “Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal USM Law Review*, 8(2), (Agustus, 2025): 709-728, DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>
- Wicaksana, V, et al, “Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal USM Law Review*, 8(2), (Mei 2025): 709-728, DOI:10.26623/julr.v8i2.11092.

- Wijaya, F, A, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(3), (September 30, 2025): 63-73, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4474>.
- Winarno dan Prihantoro, E, “Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru yang Selaras Dengan Konstitusi dan HAM”, *Jurist-Diction*, 1(2), (Juli 2024): 1-15, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56120>.

Tesis

- Nugraha, F, A, “Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Rantau, P, “Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Jaksa Agung Republik Indonesia. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 426, Pasal 427, dan Pasal 86 huruf f beserta Penjelasannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds.

Laporan dan Sumber Resmi Pemerintah

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Polri*. Jakarta: Polri, 2024.

Pemerintah Kabupaten Kudus, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 40, Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 14.

Pemerintah Kabupaten Kudus, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 52 ayat (1).

Wawancara

Viola Oksianta Rahartika Kasubsi, Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kudus, Wawancara, Kudus, 14 Agustus 2026

Petrus Nico Kristian, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Wawancara, Kudus, 30 Juli 2026.